

## KESELARASAN EKONOMI SYARIAH DENGAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN PERSPEKTIF MUHAMMAD HATTA

Yunita Indriani Farisha, Naufal Kurniawan  
STAI Tanbihul Ghofiliin  
Corresponding Author : [yunitafarisha02@gmail.com](mailto:yunitafarisha02@gmail.com)

### Abstrak

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak pernah surut. Bahkan persoalan perekonomian masyarakat semakin dirundung ketimpangan ekonomi dan semakin mempertanyakan dimana letak kesejahteraan masyarakat. Keselarasan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kerakyatan perspektif muhammad hatta adalah salah satu jawaban persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya menyelaraskan sistem ekonomi kerakyatan yang tetap pada prinsip syariah serta mengetahui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian penulis disini adalah penelitian kepustakaan dengan studi litteratur, dimana pelaksanaan dari penelitian ini menggunakan literatur dari berbagai buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Teknik studi literatur yang dilakukan yaitu dengan menelusuri kepustakaan mengenai teori-teori karya ilmiah baik yang berasal dari buku-buku, makalah, maupun journal online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan berbasis syariah memiliki beberapa hal diantaranya adalah ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain: 1. Kesatuan (*unity*), 2. Keseimbangan (*equilibrium*), 3. Kebebasan (*free will*) 4. Tanggungjawab (*responsibility*). Tiga komponen dasar ekonomi kerakyatan yang dapat mengembangkan ekonomi syariah tertuang dalam UUD 1945, yaitu: a). prinsip kebersamaan, b). kekuasaan milik rakyat, c). serta lebih mementingkan orang banyak.

**Kata Kunci:** Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Syariah, Kesejahteraan, Ekonomi Masyarakat, Muhammad Hatta

### Abstract

Poverty in Indonesia has never subsided. In fact, people's economic problems are increasingly plagued by economic inequality and increasingly question where the welfare of the community lies. The alignment of the Islamic economy with the populist economic system from the perspective of Muhammad Hatta is one of the answers to the problem of economic inequality in Indonesia. The purpose of this research is to find out the importance of harmonizing a populist economic system that remains on sharia principles and to know its application in everyday life. The method used in this research is the library method. This study uses library research methods. The author's research method here is library research with literature study, where the implementation of this research uses literature from various books, notes, and reports on the results of previous research. The literature study technique is carried out by tracing the literature on theories of scientific work, both from books, papers, and online journals. The results of this study indicate that a sharia-based populist economy has several things including sharia economics emphasizing four characteristics, including: 1. Unity (*unity*), 2. Balance (*equilibrium*), 3. Freedom (*free will*) 4. Responsibility (*responsibility*). The three basic components of a populist economy that can develop an Islamic economy are contained in the 1945 Constitution, namely: a). the principle of togetherness, b). power belongs to the people, c). and care more about people.

**Keywords:** People's Economy, Islamic Economics, Welfare, Community Economics, Muhammad Hatta

## **Pendahuluan**

Ekonomi Kerakyatan adalah Ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan potensi yang dapat dimanfaatkan di dalam masyarakat itu sendiri yang mana kegiatan memanfaatkan potensi ini akan memberi dampak meningkatnya ekonomi dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat disekitarnya (Alma Faisola, 2020: 27). Ekonomi Kerakyatan, yakni ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (KBBI: 355). Sementara kesejahteraan masyarakat sendiri merupakan tolak ukur dari terjalannya perekonomian negara. Sedangkan masyarakat juga tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah, namun melakukan usaha secara mandiri dalam membangkitkan perekonomian serta meningkatkan taraf hidupnya.

Dari tingkat kemiskinan yang meningkat, menyebabkan garis ketimpangan perekonomian semakin jelas. Ketimpangan ekonomi tersebut begitu terasa oleh masyarakat kalangan kecil dengan pendapatan yang tidak menentu, sebab masyarakat tersebut bukan terlahir sebagai rakyat berpendidikan tinggi dengan pekerjaan tetap yang menjamin. Oleh karenanya, perlu dikaji lebih lanjut, sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, terutama usaha yang berpegang teguh pada prinsip syariah. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal.

## **Metode Penelitian**

Menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian-penelitian yang sudah ada.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi literatur, dimana teknik ini disebut juga dengan studi pustaka yaitu cara menelusuri kepustakaan yang berisi tentang teori-teori dari karya ilmiah baik yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan berupa hard copy atau soft copy yang ada pada buku-buku (e-books), makalah, journal online.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Secara sepintas, dapat dipahami bahwa konsep ekonomi kerakyatan perspektif Muhammad Hatta adalah salah satu konsep ekonomi yang berbasis pada kekeluargaan atau kerakyatan. Dengan sistem kekeluargaan akan lebih mudah dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Dalam padangan beberapa tokoh ekonom berbeda-beda dalam memberikan definisi ekonomi kerakyatan. Menurut Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul “Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk Miskin)”, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat (Zulkarnain; 2006: 98).

Sedangkan menurut Mubaryo dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Sistem Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan)” menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil (Mubaryo, 1999: 81). Definisi ini lebih menyempitkan ruang lingkup sistem perekonomian

dengan tujuan untuk mempermudah membangun sistem ekonomi dari bawah. Di samping itu, tujuan dari ekonomi kerakyatan adalah perekonomian yang dimana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan juga bisa diartikan sebagai suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang dengan baik (Sabini Sumawinata, 2004: 161).

Dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam kegiatan ekonomi yang sifatnya hanya pada jangka pendek, serta berdimensi keuangan yang keterpihakannya pada orang-orang mempunyai uang banyak. Akan tetapi ekonomi kerakyatan dapat dipahami secara komprehensif dalam artian memperhatikan aspek kualitatif ataupun kuantitatif, keuangan dan non keuangan dan aspek lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan tidak berdasarkan pada pemerataan, pertumbuhan ataupun stabilitas akan tetapi lebih pada keadilan, partisipasi dan keberlanjutan perilaku ekonomi masyarakat (Ginanjari, 1996: 222-232).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### 1) Prinsip Dasar Ekonomi Kerakyatan Perspektif Muhammad Hatta

Sistem ekonomi rakyat disebut dengan perekonomian rakyat atau ekonomi kerakyatan. Makna yang lebih luas ekonomikerakyatan mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem dari sistem ekonomi pancasila (Uandi Hamid, 2012: 37). Secara makna harfiah, kata rakyat tertuju pada seluruh masyarakat atau orang yang berada dalam suatu wilayah atau negara tertentu. Secara terminologi, ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia.

Ekonomi kerakyatan menurut Muhammad Hatta adalah demokrasi ekonomi, yaitu suatu sistem ekonomi yang memberikan hak dan kesempatan kepada rakyat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara bebas, adil, dan bertanggung jawab. Demokrasi ekonomi juga menghargai hak milik pribadi, tetapi tidak membiarkan terjadinya monopoli atau oligopoli oleh segelintir orang atau kelompok.

Tiga komponen dasar ekonomi kerakyatan dalam mengembangkan ekonomi syariah, yaitu: a). prinsip kebersamaan, b). kekuasaan milik rakyat, c). serta lebih mementingkan orang banyak. Dan hal tersebut telah masuk ke dalam prinsip-prinsip lain yang dicetuskan Muhammad Hatta yang terkandung dalam pasal 33, meliputi;

##### a. Prinsip kekeluargaan.

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN dan BUMS, BUMD.

b. Prinsip keadilan.

Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, pengusaha maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama dan gender, semuanya sama dalam lapangan ekonomi.

c. Prinsip pemerataan pendapatan.

Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Kalau selama ini pemerintah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata itu hanya semu belaka. Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada pemerataan pendapatan. Pertumbuhan itu hanya dirasakan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas masyarakat berbeda pada posisi miskin dan melarat. Prinsip lainnya menurut perspektif Muhammad Hatta, di antaranya:

a. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b. Prinsip kerja sama atau saling membangun relasi.

Prinsip ini lebih mengarah pada kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kerja sama atau saling membantu untuk memenuhi kegiatan ekonomi. Dengan kerja sama serta saling membantu satu sama lain tentu berbagai kegiatan usaha kecil atau bahkan usaha besarpun akan mudah terkendalikan.

Dari prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan dengan hal lainnya, bahwa setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam menerapkan ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hatta, yaitu:

- a) Perekonomian dibentuk dan dirancang secara bersama-sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.
- b) Segala bentuk produksi yang menunjang untuk kemajuan negara serta kepentingan orang banyak harus dikelola oleh negara.
- c) Negara berperan besar terhadap pengelolaan kekayaan alam yang dimilikinya untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat.

1) Wujud Kemandirian Masyarakat dalam Berdaya Ekonomi

Menurut Hatta, rakyat harus memiliki banyak peran dalam menjunjung perekonomian negara. Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Namun demikian, tidak juga terlepas dari ulur tangan pemerintah dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakatnya. Sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan mengatasi ketimpangan sosial

Poin penting dari ekonomi kerakyatan yaitu berangkat dari ide-ide kreatif rakyat dalam mengembangkan perekonomian yang didukung oleh negara. Ekonomi kerakyatan tidak akan lepas dari keadilan dan demokrasi ekonomi yang selalu berpihak pada kesejahteraan atau welfare ekonomi rakyat.

Ekonomi rakyat dapat terwujud dengan adanya bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara swadaya dan gotong royong dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Kesejahteraan adalah aspek yang sangat berpengaruh dalam lajunya roda perekonomian maupun pemerintahan, karena dalam suatu negara hal yang melandasi pemerintahan berhasil salah satunya dapat dilihat dari kesejahteraan serta kemakmuran masyarakatnya. Dalam hal tersebut, kekayaan alam harus dapat dikelola dengan baik oleh semua lapisan masyarakatnya, terutama oleh pemerintah.

Dari tiga prinsip ini, dapat diketahui bahwa kedudukan sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat ditolong dengan hadirnya beberapa lembaga perbankan dan bahkan sistem ekonomi kapitalis yang menguasai sekarang ini. Keadaan ini hanya akan dapat diperbaiki dengan berangsur-angsur serta secara bertahap dengan pendekatan sistem ekonomi kerakyatan, dengan kata lain dengan mengadakan dan mengembangkan perkoprasian produksi, konsumsi dan dibantu dengan koperasi kredit usaha rakyat demi kemajuan ekonomi rakyat.

## 2) Peran Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Hatta memandang bahwa sistem ekonomi kerakyatan akan mampu memberikan banyak solusi terhadap ketimpangan yang terjadi pada masyarakat. Istilah dari konsep ekonomi kerakyatan merupakan salah satu hasil renungan pemikiran yang diperkenalkan oleh Muhammad Hatta. Pemikiran ini tertuang dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya” pada tahun 1934.

Selanjutnya, Muhammad Hatta juga memiliki pemikiran yang fenomenal berkaitan dengan membangkitkan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, pedagang kecil melalui jalan koperasi. Gagasan ini adalah salah satu bentuk dukungan terhadap keberhasilan dari sistem ekonomi kerakyatan. Dengan adanya sistem ekonomi kerakyaan ini diharapkan masyarakat akan banyak ikut serta dalam mensukseskan negara. Di samping itu, dengan membangkitkan semangat kebersamaan membangun ekonomi akan lebih mudah untuk memajukan negara. Hal ini juga akan memberikan dampak yang cukup jelas pada pada sistem ekonomi negara baik dalam jangka waktu dekat, maupun panjang.

Tujuan utama ekonomi kerakyatan tidak lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian mereka sendiri. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek atau pelaku perekonomian. Mereka tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek perekonomian. Adapun secara garis besar sasaran pokok ekonomi kerakyatan meliputi empat poin penting yaitu:

Pertama, tersedianya beberapa peluang kerja serta penghidupan yang layak untuk masyarakat.

Kedua, terealisasinya sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Ketiga, pendistribusian modal kepemilikan yang merata kepada masyarakat.

Keempat, seluruh kegiatan pembentukan produksi serta pembagian bagi hasilnya harus berlangsung di bawah pimpinan anggota masyarakat (Indra Ismawan, 2001: 97).

## 3) UMKM dalam Keseirasan Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Syariah

Ekonomi kerakyatan dalam UMKM yang diselaraskan dengan ekonomi syariah adalah suatu bentuk usaha ekonomi yang didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaannya. UMKM berbasis

ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik, antara lain (Hilman Latief, 2020) Menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan syariat Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain

- Melarang praktik-praktik yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, gharar, maysir, dan zulm
- Menyediakan produk atau jasa yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat
- Menjalankan usaha dengan cara yang profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab
- Menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat, infaq, shadaqah, atau waqaf

UMKM berbasis ekonomi syariah memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama di masa pandemi Covid-19. Hal ini karena UMKM berbasis ekonomi syariah dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, seperti:

- Menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi rakyat
- Mendorong kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar
- Mengurangi ketergantungan pada pinjaman atau investasi asing yang berbunga
- Menumbuhkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial dalam berusaha
- Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

Salah satu cara untuk memajukan UMKM berbasis ekonomi syariah adalah dengan melakukan transformasi digital, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam proses produksi, distribusi, pemasaran, dan transaksi. Transformasi digital dapat membantu UMKM berbasis ekonomi syariah untuk:

- a) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha
- b) Meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas dan beragam
- c) Meningkatkan pencatatan dan pengelolaan data usaha
- d) Meningkatkan kredibilitas dan reputasi usaha
- e) Meningkatkan daya saing dan adaptasi usaha

Beberapa contoh platform digital yang dapat digunakan oleh UMKM berbasis ekonomi syariah adalah:

- E-commerce syariah, seperti Tokopedia Syariah, Bukalapak Syariah, Shopee Halal Center, Lazada Halal Store, dan lain-lain
- Fintech syariah, seperti Alami.id, Ammana.id, Dana Syariah Indonesia, Ethis.id, Koinworks Syariah, dan lain-lain
- Media sosial syariah, seperti SalamWeb Browser, Sadaqah.id, Muslim Go Online (MGO), Muslim Market.id (MMI), dan lain-lain.

Ekonomi kerakyatan berbasis syariah memiliki beberapa keuntungan dan pentingnya diantaranya adalah:

1. Mewujudkan integritas sebagai muslim yang kaffah sehingga keislamannya tidak diragukan lagi.
2. Mendorong pendapatan masyarakat supaya merata.
3. Mendukung kemajuan ekonomi Islam.
4. Mendukung gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
5. Memperkuat pengamanan sosial

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Quran, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain: 1. Kesatuan (*unity*), 2. Keseimbangan (*equilibrium*), 3. Kebebasan (*free will*) 4. Tanggungjawab (*responsibility*). Manusia sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan di bumi. Untuk itu yang dilakukan dalam Ekonomi Islam selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat kecil atau selalu yang menyentuh pada bidang pembangunan ekonomi kerakyatan yaitu bagaimana masyarakat bisa aktif dapat meningkatkan penghasilannya.

### **Kesimpulan**

Ekonomi kerakyatan yang diselaraskan dengan ekonomi syariah adalah sebuah sistem perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi berbasis prinsip syariah. Sistem ini memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 serta berpegang teguh pada al-Qur'an dan as-sunnah. Dalam ekonomi kerakyatan berbasis syariah, kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan utama. Ekonomi Islam suatu perekonomian yang melandasi dalam pelaksanaannya yang bersifat adil, lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan. Mengapa demikian dalam ekonomi Islam adalah perekonomian yang membuat semua sejahtera dan tidak merusak lingkungan sekitarnya. Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia maupun di dunia ini yang semakin pesat, mempunyai konsekuensi terhadap pemenuhan akan kebutuhan SDM Syariah.

### **Daftar Pustaka**

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Edy, Uandi Hamid, *Dinamika Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2012).
- Ekonomi Alternatif (Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde*
- Faisola, Alma, 2020, *Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*.
- Ismawan, Indra, *Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah*, (PT. Grasindo: Jakarta, 2001).
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996).
- Latief, Hilman, *Transformasi Digital untuk Pemulihan UMKM Berbasis Ekonomi Syariah*. (Bisnis.com: Jakarta, 2020).
- Mubaryo, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999).
- Sumawinata, Sabini, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Suwandi, 2012, *Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Iqtishaduna*.

Yunita Indriani Farisha, Naufal Kurniawan

Zulkarnain, Kewirausahaan, *Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006).